

NASKAH KERTAS KECIL
29 SEPTEMBER 2014
Jam 16.05



**PIDATO KETUA DPR-RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014
DAN PENUTUPAN MASA BHAKTI ANGGOTA DPR 2009-2014**

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2014



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR-RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014
DAN PENUTUPAN MASA BHAKTI ANGGOTA DPR 2009-2014**

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- Para Wakil Ketua,
- Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan
- Para Anggota Dewan,

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Alhamdulillahirobil'alamin, rasa syukur tidak henti-hentinya kami persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahNya, hari ini kita bersama-sama dapat hadir di dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 sekaligus Penutupan Masa Keanggotaan DPR Periode 2009-2014.

Sidang hari ini tentunya sangat bermakna, terutama bagi para anggota Dewan yang tidak akan duduk kembali di lembaga DPR yang sangat kita hormati ini. Tanpa terasa, masa bhakti lima tahun yang kita jalani sejak 1 Oktober 2009 akan segera berakhir. Besok pagi, 1 Oktober 2014, para calon anggota DPR Hasil Pemilu

Legislatif 2014 akan mengucapkan sumpah/janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan.

Selama kurun waktu lima tahun, kita telah membangun kerjasama yang cukup harmonis, tidak saja di antara kita, para anggota Dewan dari berbagai fraksi, tetapi juga kerja sama dengan Presiden dan seluruh perangkat kabinetnya dalam mewujudkan tata kehidupan bernegara yang demokratis dalam mengemban amanah konstitusi.

Alhamdulillah semua telah berjalan dengan baik, penuh dinamika yang mewarnai kiprah kita dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat. Banyak capaian yang telah dihasilkan, tetapi masih banyak pula kritik dan saran masyarakat yang ditujukan kepada lembaga ini, khususnya berkaitan dengan kinerja. Bahkan kritik masyarakat melalui media massa dalam berbagai kesempatan, ditujukan pula kepada para anggota Dewan, berkaitan dengan penerapan etika, perilaku anggota, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan. Ini semua tentu akan menjadi catatan penting bagi lembaga DPR hasil Pemilu 2014 untuk menyempurnakannya.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 cukup pendek, hanya berlangsung 33 hari kerja. Namun demikian, kita semua para anggota Dewan berusaha untuk memaksimalkan tugas-tugas kedewanan, memenuhi agenda yang telah diputuskan oleh rapat Badan Musyawarah DPR-RI.

Kami akan menguraikan tugas legislasi dalam Masa Sidang I, sekaligus akan memberikan gambaran garis besar tentang kinerja DPR dalam mengemban tiga tugas utama selama kurun waktu lima tahun, 2009-2014, yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja DPR setiap tahun secara lengkap sudah disampaikan pada setiap rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun DPR-RI setiap tanggal 29 Agustus.

Hasil pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah Periode Keanggotaan 2010–2014, tidak hanya dilihat dari target kuantitatif (jumlah UU yang dihasilkan), tapi harus dilihat pula dari banyaknya UU yang benar-benar pro-rakyat. Seperti, UU tentang BPJS, UU tentang Desa, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU tentang Bantuan Hukum, UU tentang Penanganan Fakir Miskin, dan lain-lain.

Sampai tanggal 29 September 2014, DPR telah menyelesaikan 69 (enampuluh sembilan) RUU Prioritas yang telah ditetapkan

dalam Prolegnas Jangka Menengah untuk 5 tahun. Selain RUU Prioritas, DPR juga telah menyelesaikan sejumlah 56 (limapuluh enam) RUU Kumulatif Terbuka, terdiri dari kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, kumulatif terbuka akibat putusan MK, kumulatif terbuka tentang APBN, kumulatif terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kumulatif terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU. Di samping itu, terhadap RUU Prolegnas 2014 usulan DPD-RI, telah dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui dan disahkan menjadi UU yaitu RUU tentang Kelautan. Secara keseluruhan, dalam periode keanggotaan 2009—2014, DPR telah menyetujui 126 (seratus dua puluh enam) RUU untuk disahkan menjadi UU.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Menjelang akhir Masa Bhakti DPR, yaitu pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014, Dewan berusaha untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU yang sudah memasuki tingkat I, di antaranya yaitu: RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang Usaha Perasuransian, RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, RUU tentang Jaminan Produk Halal,

RUU tentang Perlindungan Anak, RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Tenaga Kesehatan, RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, RUU tentang Hukum Disiplin Militer, RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Kelautan, dan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.

Namun demikian, terdapat sekitar 27 (dua puluh tujuh) RUU Prioritas yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi-Komisi dan Pansus, yang belum dapat diselesaikan, di antaranya: RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Perubahan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (judul menjadi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri), RUU tentang Kepalangmerahan, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. RUU terakhir ini merupakan usul DPR dan bahkan sudah diperpanjang sampai sepuluh kali masa persidangan, tetapi karena tidak ada kesungguhan Pemerintah untuk melanjutkan, maka tidak dapat diselesaikan.

Beberapa usulan dari panitia-panitia khusus berharap, RUU-RUU yang tidak dapat diselesaikan tersebut, dapat dibahas pada keanggotaan DPR periode yang akan datang dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Namun demikian, mengenai masalah ini (*carry over* legislasi) memerlukan payung hukum yang jelas.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan Prolegnas selama ini sulit mencapai target karena berbagai kendala. Di antaranya, penentuan target Prioritas Tahunan yang terlalu tinggi. Belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi. Lemahnya parameter yang digunakan untuk menentukan RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas, dan penyelesaian pembahasan seringkali *dead-lock* untuk materi-materi tertentu karena adanya ketidaksepahaman/ketidaksepakatan antara Pemerintah dengan DPR. Namun demikian, perbaikan terus dilakukan, baik berkaitan dengan proses legislasi, struktur maupun mekanismenya. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi DPR yang akan datang, untuk mendapatkan perhatian.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pada Masa Sidang I, ada 2 (dua) RUU tentang Anggaran telah diselesaikan, yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2013 dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015. RUU ini telah dimulai pembahasannya pada Masa Sidang IV dalam bentuk pembicaraan pendahuluan. Pada forum ini, DPR dan Pemerintah telah menyepakati angka-angka asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta rencana kerja pemerintah sebagai acuan penyusunan RAPBN 2015.

RUU APBN Tahun Anggaran 2015 memiliki makna khusus, selain merupakan APBN Transisi yang hanya memuat *baseline* dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru nantinya untuk melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan visi dan misinya, juga kewenangan DPR-RI dalam membahas RAPBN sampai dengan fungsi dan program. Namun demikian, perubahan format RAPBN tidak mengurangi kualitas pembahasan di DPR guna mewujudkan APBN sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

Untuk kurun waktu lima tahun, DPR telah dapat menyelesaikan 16 (enam belas) RUU di bidang anggaran. Semua dalam rangka memenuhi amanat konstitusi. Politik anggaran DPR sebenarnya

dapat dilakukan pada proses perubahan anggaran negara yang sedang berjalan (APBN-Perubahan), tetapi tantangan yang dihadapi justru keterbatasan waktu, sehingga menyulitkan untuk menetapkan dan menentukan prioritas anggaran mana yang paling urgen untuk dilakukan perubahan. Evaluasi pelaksanaan anggaran yang merupakan fungsi pengawasan DPR, dilakukan dalam bentuk pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN setiap tahunnya.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yaitu tahun sidang 2013-2014, suasana politik nasional berkembang sangat dinamis, sebagai akibat pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Seakan-akan ada pergeseran terkait dengan peta kekuatan politik di lingkungan parlemen dan gencarnya penilaian publik terhadap kinerja lembaga DPR, yang segera akan mengakhiri tugas. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tetap berjalan sesuai rambu-rambu dan tata tertib DPR, baik pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN, maupun pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.

Panja-panja Pengawasan telah dibentuk hampir di semua komisi, tim-tim pengawas juga telah dibentuk DPR, melengkapi

tugas pengawasan yang dilakukan dalam bentuk Rapat-Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat. Sebagai contoh Tim Pengawas Century, Timwas Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, Tim Pengawas TKI, Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Timwas Penanggulangan Bencana Jawa Barat, Sumatera Barat dan Jambi, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Tim-tim ini terus bekerja. Pada hari-hari terakhir menjelang Penutupan Sidang, semua Tim Pengawas yang dibentuk DPR, telah melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat paripurna. Tim-Tim pengawas tersebut telah menghasilkan berbagai rekomendasi penting. Pimpinan berharap, rekomendasi dari berbagai tim tersebut akan ditindaklanjuti oleh DPR yang akan datang.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Di samping pelaksanaan tiga fungsi tersebut, DPR juga melakukan penetapan atas calon-calon pejabat publik sebagaimana yang diatur dalam berbagai UU. Proses ini dilaksanakan oleh Komisi terkait melalui *fit and proper test* dan penilaian secara kompetitif atas calon-calon yang masuk ke DPR

dengan mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam proses pemilihan. Para calon kemudian diputuskan oleh Rapat Paripurna DPR.

Pada masa sidang ini, Komisi XI telah memilih 5 (lima) anggota BPK yang baru untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Lima calon yang telah ditetapkan Komisi XI adalah penyaringan dari 61 (enam puluh satu) calon. Kelima calon yang telah lolos tersebut adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, H. Rizal Djalil, dan Eddy Mulyadi Soepardi, selanjutnya dilaporkan dalam Rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan. Melalui perdebatan panjang, kelima calon tersebut ditetapkan menjadi Anggota BPK setelah satu calon yaitu Eddy Mulyadi Soepardi harus melalui fatwa dari Mahkamah Agung sehubungan dengan persyaratan administrasi.

Komisi III juga telah menyelesaikan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Empat di antaranya telah disetujui menjadi Hakim Agung, yaitu H. Amran Suadi, Sudrajad Dimiyati, Purwosusilo, dan Is Sudaryono.

Selama lima tahun, Dewan banyak melakukan proses penetapan pejabat publik diantaranya adalah Panglima TNI, Kapolri, Deputy Gubernur Bank Indonesia, anggota Mahkamah Konstitusi, anggota Mahkamah Agung dan anggota Komisi-Komisi Negara.

Pertimbangan juga diberikan oleh DPR terhadap calon Duta-Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia sejumlah 105 (seratus lima), dan calon-calon Dubes Republik Indonesia untuk negara sahabat sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua). Tugas-tugas DPR tersebut merupakan amanah dari amandemen UUD 1945.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memiliki semangat untuk mengembangkan demokrasi internal dan penguatan kelembagaan DPR, serta diikuti dengan pengesahan Tata Tertib DPR pada Rapat Paripurna 16 September, maka DPR-RI periode 2014-2019, telah memiliki landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Perlu kami informasikan bahwa DPR periode ini juga telah melakukan kerjasama dengan KPK dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di lingkungan DPR, setelah sebelumnya KPK melakukan survey dan kajian terhadap proses kerja yang dilaksanakan di DPR.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka menentukan arah ke depan dan memberi pedoman kerja lembaga dan Sekretariat Jenderal, DPR-RI periode ini telah menetapkan rencana strategis (Renstra DPR-RI 2010-2014) dengan visi: "Terwujudnya DPR-RI sebagai Lembaga Perwakilan yang Kredibel dalam Mengemban Tanggung jawab Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur", dengan misi "Mengefektifkan Fungsi-Fungsi DPR di Bidang Legislasi dan Pengawasan Serta Fungsi Anggaran Secara Akuntabel dan Transparan." Renstra ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran Alat Kelengkapan Dewan sehingga benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai harapan. Baru pada periode ini DPR memiliki Renstra. Pelaksanaan Renstra memang belum memenuhi target sebagaimana yang diinginkan. Dengan Renstra, DPR bermaksud meletakkan pondasi. Kiranya DPR yang akan datanglah yang akan mencermati dan menindaklanjutinya.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Peran DPR-RI di forum parlemen regional dan internasional sangat membanggakan. Kegiatan yang kita namakan diplomasi parlemen dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat, baik melalui forum Grup Kerjasama Bilateral, sidang-sidang antar

parlemen, dan juga melalui forum-forum lain yang pada hakekatnya ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Kegiatan ini memiliki arti penting untuk menyokong diplomasi pemerintah sebagaimana amanah UUD NRI Tahun 1945. Dalam forum-forum ini selama lima tahun DPR-RI melalui berbagai delegasi yang dikirim ke berbagai konferensi internasional maupun pada saat menjadi penyelenggara didalam *event* internasional tersebut, mampu merespon berbagai isu yang berkembang yang terjadi di berbagai kawasan di dunia. Termasuk perjuangan Indonesia yang terus-menerus dilakukan untuk menjadikan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Sepanjang prinsip-prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional tidak terlanggar, upaya diplomasi DPR-RI merupakan langkah yang sangat terpuji, karena memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang demokratis (demokrasi terbesar ketiga di dunia), citra negara muslim terbesar di dunia yang memiliki karakteristik moderat, citra negara dengan penduduk terbesar keempat dunia yang berkarakteristik pluralistik namun damai, dan citra sebagai negara yang sangat aktif di pentas global. Di era globalisasi saat ini, sangat terbuka peluang untuk membangun kerjasama dan hal ini telah direspon positif oleh para anggota DPR-RI.

Dalam periode lima tahun ini, dengan rasa bangga kami melaporkan bahwa beberapa jabatan penting telah dipegang oleh beberapa anggota DPR terutama pimpinan dan anggota BKSAP, dan yang tak kalah penting adalah peran Ketua DPR sebagai Presiden APA (*Asian Parliamentary Assembly*) periode 2009-2010, Presiden FASPPED (*Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education*) 2009-2010, Presiden PUIC (*The Parliamentary Union of the OIC Member States*) 2012-2013, Presiden AIPA (*ASEAN Inter Parliamentary Assembly*) 2011-2012, Presiden SEAPAC (*South-east Asian Parliamentarians Against Corruption*) 2013-2015, dan *Chairman of WESA (World Ecological Safety Assembly)* 2012, dan Ketua Nasional Chapter GOPAC (*Global Organization of Parliamentarian against Corruption*) tahun 2013-2015 oleh Wakil Ketua DPR Korinbang. Selain itu Dr. Nurhayati Assegaf Anggota BKSAP akan berkompetisi untuk memperebutkan kursi Presiden IPU (*Inter Parliamentary Union*) periode 2014-2017. Tidak kalah penting, Sekjen DPR-RI juga dipercaya menduduki jabatan penting, sebagai *Ordinary Member of Executive Committee ASGP 2014-2016*.

Hadirin, Sidang Dewan yang terhormat,

Selama lima tahun kita telah bekerjasama, ada kalanya terjadi “benturan-benturan kecil” karena adanya perbedaan pendapat di dalam melihat suatu masalah maupun dalam proses penyelesaiannya, baik antar anggota Dewan, antar fraksi maupun antara Pimpinan Dewan dengan para anggota Dewan. Semua ini adalah warna-warni dinamika demokrasi yang telah kita jalani. Namun, satu hal yang sangat mengemuka adalah tekad yang sama di antara kita, untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Sejak awal, kita telah bertekad untuk membangun lembaga perwakilan rakyat yang amanah, akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu mewujudkan mekanisme *check and balances* dalam berdemokrasi. Tekad ini terpatri di hati nurani kita masing-masing sejak kita mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPR, 1 Oktober, lima tahun yang lalu.

Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada benang yang tidak putus. Demikian pula manusia, tidak ada yang sempurna, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Pada forum yang terhormat ini, izinkan saya dan para Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Dewan, menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota

Dewan apabila ada tindakan ataupun berbagai ucapan yang mungkin saja tidak berkenan dihati.

Ucapan yang sama kita sampaikan juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mempercayakan kepada kita untuk duduk sebagai wakil-wakil mereka. Kepada Presiden RI, Wakil Presiden dan seluruh jajaran kabinet, tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dan kekurangsempurnaan di dalam pengabdian kita di lembaga DPR yang kita cintai dalam mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepada rekan-rekan pers, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kritik dan saran yang telah diberikan, kesemuanya itu menjadi bahan introspeksi bagi kami maupun bagi perjalanan DPR ke depan.

Kepada Sekretaris Jenderal dan jajarannya, kami tak lupa menyampaikan terimakasih atas dukungan dan semangatnya di dalam membantu Pimpinan dan anggota Dewan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Seiring dengan perjalanan tugas-tugas tersebut, mungkin ada saja hal-hal yang mengganjal di hati para staf, maka di forum inilah kami menyampaikan permintaan maaf. Pimpinan berharap, bahwa ke depan, Sekretaris Jenderal dan jajarannya dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugas sehingga dapat

memberikan andil bagi peningkatan kinerja DPR-RI pada tahun-tahun kedepan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat bekerja, kepada anggota DPR yang terpilih kembali. Kepada yang tidak terpilih kembali, kami mengucapkan selamat bekerja di ladang pengabdian baru. Semua bidang tugas adalah mulia, masih sangat terbuka ruang untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara demi terwujudnya Indonesia yang kita cita-citakan bersama, yaitu Indonesia yang penuh kedamaian dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam Pidato Akhir Masa Persidangan sekaligus akhir Masa Bhakti DPR-RI 2009-2014.

**Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
Kalau ada umur panjang, boleh kita bersama lagi.**

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita, memberikan rahmat dan hidayahnya. Amien.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 30 September 2014

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. MARZUKI ALIE